ANALISIS DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:
Valentina Arie Purwaningsari
NIM: 022114081

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006

Skripsi

ANALISIS DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Oleh:
Valentina Arie Purwaningsari
NIM: 022114081

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal: 9 Agustus 2006

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Tanggal: 26 Agustus 2006

MT. Ernawati, S.E., M.A.

Skripsi

ANALISIS DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Valentina Arie Purwaningsari
NIM : 022114081

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 28 September 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

		Nama Lengkap	**Tanda Tangan**
Ketua	:	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	.....
Sekretaris	:	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	.....
Anggota	:	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	.....
Anggota	:	MT. Ernawati, S.E., M.A.	.....
Anggota	:	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	.....

Yogyakarta, 30 September 2006
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

WHEN THE FEAR AND WORRY TEST YOUR FAITH
AND ANXIOUS THOUGHTS ASSAIL, REMEMBER GOD IS IN
CONTROL AND HE WILL NEVER FAIL.
(SPER)

Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru...tetapi
Ia menjanjikan akan membuat kita bisa melalui
segala keadaan.
(Robert H. Schuller)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik*
- *Bunda Maria yang penuh kasih*
- *Bapak dan Mama tercinta*
- *Mba Ino'ku tersayang*

Genggamlah tangan temanmu selama waktu-waktu sulit. Biarkanlah ia menemukan cinta melalui pelukan dan senyumanmu; tapi juga harus tahu saat tiba waktunya untuk merelakan...
Karena kita semua harus belajar untuk tumbuh.
(Sharon A. Heilbrunn)

Special thanks to my lovely friends:

- *Yappy, Nonot, Diah P.E, Harto, Bayu, Gagat, Dedy, Irna, Benni, Mita, Katri,*
- *Riska, Wawan, Hendra, Deasy, Anin, K' Wanti, Yuli, Brenda, Mega, Freska, Ntine,*
- *Toink, Uche, K' Tommy, K' Obie, K' Ian,*
- *Nciz, Itok, Beny, Anton, Anna, Agnez, Sisca, Aga,*
- *Iin, K' Diah, K' Finda, Widya, Selly.*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 29 Agustus 2006

Penulis,

Valentina Arie Purwaningsari

ABSTRAK

ANALISIS DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Valentina Arie Purwaningsari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2006

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, (2) mengetahui bagaimana perubahan dana perimbangan dari tahun 2001-2004, (3) mengetahui prediksi/peramalan dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta selama bulan Mei-bulan Juni 2006 dengan obyek dana perimbangan selama tahun 2001-tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak dan pegawai instansi yang terkait di BPKD Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan (1) analisis kontribusi, yaitu dengan menggunakan perbandingan/rasio antara realisasi dana perimbangan tahun 2001-2004 terhadap realisasi pendapatan daerah tahun 2001-2004 dikalikan 100%; (2) analisis indeks berantai, yaitu dengan cara perbandingan dana perimbangan tahun sesungguhnya terhadap dana perimbangan tahun sebelumnya dikali 100%; (3) trend garis lurus dengan *Least Square Method.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) rata-rata kontribusi dana perimbangan di Kota Yogyakarta pada tahun 2001-tahun 2004 sebesar 70,90%; (2) perubahan dana perimbangan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan; (3) prediksi atau peramalan dana perimbangan Kota Yogyakarta untuk tahun 2005-tahun 2009 mengalami peningkatan.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF BALANCING FUND TO LOCAL REVENUE
(A case study at Yogyakarta Municipality Government)

Valentina Arie Purwaningsari
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2006

The aims of this research were to examine: (1) how much the contribution of balancing fund to local revenue in Yogyakarta Municipality Government, (2) How the change of balancing fund from 2001-2004, (3) the prediction of balancing fund for next five years.

The type of the research was a case study in Yogyakarta Municipality Government from May until June 2006 with the object of balancing fund from 2001-2004. The techniques of data collection used in this research were library research, documentation and interview with the related staff at BPKD of Yogyakarta Municipality Government.

The techniques of the data analysis used in this research were (1) Contribution analysis using comparison/ratio between the realization of balancing fund at 2001-2004 to the realization of local revenue at 2001-2004 multiplied with 100%; (2) Chain index by comparing between current year balancing fund with the previous year balancing fund and multiplied it with 100%; (3) Least Square's Method.

The result of this research showed that: (1) the average of contribution of balancing fund in Yogyakarta at 2001-2004 was 70.90%; (2) the change of balancing fund in Yogyakarta was increase; (3) the prediction of balancing fund in Yogyakarta for 2005-2009 will be increase.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah menerima saya sebagai bagian dari Keluarga Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kelancaran dalam studi melalui sarana dan prasarana selama saya kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, semangat, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. MT. Ernawati, S.E., M.A. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, semangat, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt. sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
8. Ibu Ratna dan semua staf BPKD Kota Yogyakarta atas semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis dalam mencari data untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
9. Pojok BEJ, Perpustakaan Sanata Dharma, Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, dan Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan referensi dan sarana pendukung untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Christoforus. S, Mama Antonia Ratni, dan Mba Ino-ku yang telah mengajariku untuk selalu mensyukuri segala berkat Tuhan dan selalu memberikan *support* melalui doa, kasih sayang, *advice*, dan dukungan baik moril maupun materiil yang begitu besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Eyang Br. Cajetanus, FIC, dan Eyang Rm. Djono, Pr yang telah memberikan dukungan doa dan kasih sayang kepadaku.
12. Teman-teman'ku: Yappy, Nonot, Diah P.E, Gagat, Dedy, Mita, dan Wawan. Terima kasih atas masukan, saran, dan kesediaan untuk *brain storming* membahas skripsiku.
13. Teman-teman MPT: Wawan, Upik, Toink, Alfons, Ferry, Ani, Magda, Mba Heni, Mba Santi, Mba Diana, Mas Frans, Mas Sigit. Terima kasih atas dukungan, saran dan masukan yang berguna dalam proses penyusunan skripsi.
14. Sr. Benedicte, C.B. selaku pimpinan Asrama Syantikara dan Sr. Elia, C.B. yang telah menerima saya sebagai keluarga besar Syantikara.
15. Seluruh pihak yang belum dapat disebut namanya satu per satu di sini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 30 September 2006

Valentianus

Penulis

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Batasan Masalah 3

D. Tujuan Penelitian 3

E. Manfaat Penelitian 4

F. Sistematika Penulisan 5

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Konsep Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 8

B. Sumber-sumber Penerimaan Daerah 9

C. Dana Perimbangan 11

D. Transfer Pemerintah 20

E. Review Penelitian 21

BAB III METODA PENELITIAN 27

A. Jenis Penelitian 27

B. Tempat dan Waktu Penelitian 27

C. Subjek dan Objek Penelitian 27

D. Data yang Diperlukan 27

E. Teknik Pengumpulan Data 28

F. Teknik Analisis Data 29

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA 33

A. Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta 33

B. Kondisi Geografis 34

C. Pemerintah Daerah 35

D. Pembagian Wilayah 36

E. Kependudukan 36

F. Tenaga Kerja 38

G. Keuangan Daerah 38

H. Pendidikan 39

I. Agama 40

J. Ekonomi 40

K. Produk Domestik Regional Bruto 41

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 43

A. Analisis Data 43

B. Pembahasan 54

BAB VI PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Keterbatasan Penelitian 59

C. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 63

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 74

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Dana Bagi Hasil 17

Tabel III.1 Perhitungan Trend Dana Perimbangan..... 32

Tabel IV.1 Jarak Antara Balaikota Yogyakarta dengan Kantor Kecamatan.... 36

Tabel IV.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2004 37

Tabel IV.3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan Sekolah dan Status di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2005 39

Tabel V.1 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 44

Tabel V.2 Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001-2004 46

Tabel V.3 Realisasi Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 47

Tabel V.4 Perubahan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 49

Tabel V.5 Trend Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004..... 51

Tabel V.6 Jarak Tahun yang akan Diprediksi dengan Tahun Tengah 52

Tabel V.7 Hasil Prediksi/Peramalan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tanun 2005-2009 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan nilai dan sendi-sendi pelaksanaan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik membawa pengaruh positif bagi pemerintah daerah. Perubahan pemerintahan ini merupakan wujud dari diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut berisi tentang pemberian kewenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang dituntut untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat pun seharusnya dapat diminimalkan, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sumber pendapatan terbesar. Tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan kondisi tersebut, maka untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, daerah membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan dana perimbangan. Adapun elemen dari dana perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, meliputi:

a. Dana Bagi Hasil,
b. Dana Alokasi Umum (DAU),
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun tujuan dari dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan ini menjadi penting karena masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda sehingga dengan adanya pemerataan pendanaan yang diperoleh dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat membantu pemerintah daeran untuk membiayai seluruh kebutuhan daerahnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa realisasi pos dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar diterima oleh pemerintah daerah setempat. Realisasi dana perimbangan ini juga mempunyai pola peningkatan setiap tahunnya. Dari pola peningkatan inilah maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memprediksi besarnya dana perimbangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menciptakan

kebijakan atau program-program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, dana perimbangan menjadi hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004?
2. Bagaimana perubahan dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001-tahun 2004?
3. Bagaimana prediksi dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang?

C. Batasan Masalah

Karena penulis melakukan penelitian dari tahun 2001-tahun 2004, maka untuk tahun 2001-2003 masih digunakan acuan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Sedangkan untuk tahun 2004 penulis menggunakan acuan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2001-2004 pada Pemerintah

Kota Yogyakarta, serta perubahan dan prediksi dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan masukan dan menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih dapat mengelola penerimaan daerah secara efektif dan efisien dengan bercermin pada sejauh mana kontribusi dana perimbangan, perkembangan dan prediksi dari dana perimbangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi kepustakaan yang berguna bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Sanata Dharma sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan mengembangkan mutu pendidikan.

3. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis mengenai dana perimbangan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu dengan adanya perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik membawa pengaruh terhadap pemerintah daerah yang dituntut untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga kemampuan dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan tersebut, banyak daerah yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat yang biasa disebut dengan dana perimbangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah, serta bagaimana perubahan dan prediksi dana perimbangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang. Batasan masalah difokuskan hanya pada dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-tahun 2004. Bab ini juga menguraikan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep perimbangan keuangan pemerintah pusat dan

daerah, sumber-sumber penerimaan daerah, dana perimbangan, dan transfer pemerintah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yaitu studi kasus. Tempat dan waktu penelitian yaitu pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Subjek penelitian yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Biro Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Objek penelitian dari penelitian ini adalah dana perimbangan. Selain itu, bab ini juga berisi tentang data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Bab ini menguraikan atau menceritakan secara singkat tentang gambaran umum kota Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian, yang meliputi sejarah terbentuknya, kondisi geografis, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, dan sebagainya.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang sekilas deskripsi data terkait dengan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga berisi tentang analisis data dan pembahasan tentang hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan juga saran yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat membantu menciptakan kebijakan dan program-program untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dengan bercermin pada besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang untuk masing-masing tingkat pemerintahan antara pusat dan daerah memerlukan pendanaan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah di mana setiap tingkat pemerintah daerah mampu untuk memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan daerahnya secara independen tanpa tergantung pada subsidi pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi, sehingga sumber pendapatan sendiri menjadi sumber utama.

Di Indonesia, peranan bantuan dan sumbangan pemerintah pusat muncul karena keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat (Susanto, 2001:1-2), yaitu:

1. Kurangnya peranan perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
3. Pajak daerah hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah

4. Lebih bersifat politis, yaitu dapat mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme
5. Kelemahan pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari segi pemerataan dan birokrasi yang rumit.

Oleh karena itu, daerah otonom cenderung untuk mengandalkan dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000).

B. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dikatakan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, meliputi:

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
2) Jasa giro
3) Pendapatan bunga
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Susunan dana perimbangan menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil,
b. Dana Alokasi Umum (DAU),
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari:
   a. Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya
   b. Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

      Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

      1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
      2) Penerimaan pinjaman daerah
      3) Dana cadangan daerah
      4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

C. Dana Perimbangan

Berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian dana perimbangan ini didasarkan pada angka persentase pembagian antara pemerintah pusat dan daerah yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004.

Dana perimbangan merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang didasari oleh suatu alasan bahwa penyerahan kewenangan yang lebih luas kepada daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 memberi konsekuensi terhadap besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penerapan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Menurut RA. Musgrave dan PB. Musgrave yang dikutip oleh Abdul Halim (2004:82), ada tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan.

Dana perimbangan merupakan bentuk dari fungsi distribusi yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk menutupi ketimpangan fiskal antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa salah satu pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, elemen-elemen yang terkait dengan dana perimbangan antara lain:

1. Dana Bagi Hasil

   Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1 s/d 3), Dana Bagi Hasil terdiri dari:

   a. Pajak, meliputi:

      1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

         Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

         a) 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
         b) 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
         c) 9% untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah.

      2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

         Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

         a) 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
         b) 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.33 tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Dalam Negeri dan PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Propinsi.

b. Sumber Daya Alam, meliputi:

1) Kehutanan

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Untuk bagian daerah dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), dibagi dengan perincian:

i. 16% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan.

ii. 64% untuk daerah Kabupaten/ Kota penghasil.

b) Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan, dibagi dengan perincian:

i. 16% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan.

ii. 32% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

iii.32% untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

2) Pertambangan umum

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Untuk bagian daerah dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penerimaan negara Iuran Tetap (*land-rent*) dibagi dengan perincian:

i. 16% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan.

ii. 64% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

b) Penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*royalty*) dibagi dengan perincian:

i. 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan.

ii. 32% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

iii.32% untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

3) Perikanan

Penerimaan negara dari sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Untuk bagian daerah dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dibagikan:

i. 16% untuk daerah Propinsi yang bersangkutan

ii. 64% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil

b) Penerimaan pungutan hasil perikanan dibagikan:

i. 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan.

ii.32% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

iii.32% untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

4) Pertambangan minyak bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya) dibagi dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Daerah (0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar). Bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a) 3% untuk daerah propinsi yang bersangkutan.

b) 6% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

c) 6% untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

5) Pertambangan gas bumi

Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Daerah (0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar). Bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a) 6% untuk daerah propinsi yang bersangkutan.

b) 12% untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil.

c) 12% untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

6) Pertambangan panas bumi

Pertambangan panas bumi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a) 16% untuk propinsi yang bersangkutan.

b) 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil.

c) 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

Berikut ini adalah tabel perincian dari Dana Bagi Hasil (Marbun 2005:175):

Tabel II.1
Dana Bagi Hasil

No.	Penerimaan Negara	Pusat	Daerah
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10%	90%
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20%	80%
3	Pajak Penghasilan (PPh)	80%	20%
4	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	20%	80%
5	Dana Reboisasi	60%	40%
6	Pertambangan Umum	20%	80%
7	Pertambangan Minyak Bumi	84.5%	15.5%*
8	Pertambangan Gas Bumi	69.5%	30.5%*
9	Pertambangan Panas Bumi	20%	80%
10	Perikanan	20%	80%

Sumber: Marbun. 2005:175

* Setelah dikurangi komponen pajak

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam perseratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dalam hal ini, celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (Marbun, 2005:176).

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 28 ayat (2) dan (3), yang dimaksud dengan kebutuhan fiskal yaitu kebutuhan yang diukur menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam hal ini dikhususkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Marbun, 2005:176).

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Kebutuhan khusus (Bratakusumah, 2001:188) adalah:

a. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum.
b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, termasuk proyek yang dibiayai donor dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 40 ayat (1), pemerintah pusat menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut, perlu adanya penyediaan dana pendamping atas Dana Khusus dari APBN. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari besaran DAK yang diterima.

D. Transfer Pemerintah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), transfer pemerintah dapat diartikan sebagai sumbangan dan bantuan. Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi serta sumbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis sumbangan ini antara lain: ganjaran, subsidi/perimbangan keuangan, subsidi bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri, subsidi bantuan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, subsidi pengembangan objek wisata, tunjangan penghasilan kepala desa, dan lain-lain (Retnowati, 2005:13-14).

Bantuan adalah sejenis bantuan atas instruksi presiden (Inpres) yang digunakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara umum, bantuan (*grant*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibedakan menjadi dua macam (Halim, 2004:52-54), yaitu:

1. Bantuan umum (*general grant/unconditional grant*)
2. Bantuan khusus (*spesific grant/conditional grant*)

Pada hakekatnya bantuan tersebut diberikan untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Oleh karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana bantuan (transfer) sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

E. Review Penelitian

Penelitian yang serupa tentang dana perimbangan di antaranya pernah dilakukan oleh Elli Mayani pada tahun 2001, Risnawaty Sakkirang pada tahun 2001, Astherina Vendayanti pada tahun 2004, Aswarodi pada tahun 2004, dan Sahabudin pada tahun 2006.

Mayani (2001) melakukan penelitian yang berjudul "Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat II (pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, serta untuk mengetahui prediksi pendapatan pajak daerah tingkat II (pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan) untuk tahun anggaran 2001/2005. Analisis data yang digunakan adalah analisis horisontal yaitu dengan menggunakan perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran

1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, serta menggunakan trend garis lurus untuk teknik peramalan. Variabel yang digunakan adalah data PAD dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Dati II Wonogiri, data mengenai prosedur pemungutan pajak daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri, dan gambaran umum Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame) Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan dan penurunan antara anggaran dengan realisasinya. Prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan mengalami kecenderungan naik.

Vendayanti (2004) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah, mengetahui apakah penerimaan dari retribusi daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 sudah efektif, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003. Analisis data yang digunakan adalah dengan proporsi retribusi yaitu rasio antara besarnya retribusi dengan total retribusi daerah dikali 100%. Selain itu, analisis data menggunakan rumus efektivitas, trend (*least square*), serta rumus kontribusi. Variabel yang dipakai adalah data-data

PAD, data-data retribusi daerah, dan gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini adalah selama 5 tahun anggaran perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah terkadang mengalami kenaikan, terkadang mengalami penurunan. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2003 berkisar antara 86,02% samapai 111,89% dengan rata-rata efektivitas mencapai 101,31%. Dengan demikian penerimaan retribusi daerah sudah dapat dikatakan efektif karena rata-rata efektivitasnya telah melebihi 100%. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 berkisar antara 58,18% sampai dengan 69,47% dengan rata-rata mencapai 63,50%. Kontribusi retribusi yang mencapai 63,50% dapat dikatakan sangat besar karena dari keseluruhan PAD berarti kontribusi penerimaan daerah selain dari retribusi daerah hanya mencapai 37,50%, di mana persentase ini merupakan gabungan dari beberapa penerimaan daerah.

Sakkirang (2001) melakukan penelitian yang berjudul "Dana Perimbangan dalam Mengantisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan". Tujuan dari penelitian adalah menghitung besarnya bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Sumber Daya Alam (SDA), serta menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima sesuai bobotnya serta proyeksi penerimaannya. Analisis data yang digunakan adalah dengan formula DAU

berdasarkan pasal 7 ayat 6 & 7 Undang-Undang No. 25 tahun 1999, dan menggunakan formula transfer model AHP (*Analytical Hirarchy Proses*). Variabel yang dipakai adalah jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan medan, invers potensi ekonomi daerah i terhadap total nasional, invers rasio PAD daerah i terhadap total nasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah bagian daerah (Dana Bagi Hasil, meliputi PBB, BPHTB, dan SDA) dari dana perimbangan sebesar Rp 81.676,5 milyar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 20.259,3 milyar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 900,6 milyar. Jumlah dana perimbangan tersebut hanya sebesar 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Aswarodi (2004) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan". Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap sumber penerimaan keuangan daerah pasca pengimplementasian UU No. 25 tahun 1999. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan konsep model Dana Alokasi Umum (DAU) LPEM-UI menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Variabel yang digunakan adalah populasi daerah, luas wilayah, indeks konstruksi, jumlah penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya UU No. 25 tahun 1999, bagi daerah Kabupaten Lampung Selatan akan lebih menguntungkan karena penerimaannya meningkat cukup *significant* sebesar

132,04%. Peningkatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 146%, Dana Bagi Hasil sektor kehutanan sebesar 100%, dan Dana Bagi Hasil sektor perikanan sebesar 100%.

Sahabudin (2006) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Relatif Dana Perimbangan terhadap Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh dana perimbangan terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi NTB dan pengeluaran daerah Propinsi NTB. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi, dalam hal ini digunakan model regresi non linier (*double log*) dan analisis ekonomi yang dilakukan dengan cara mengetahui nilai elastisitas atau membandingkan koefisien parameter variabel bebas hasil estimasi dengan teori ekonomi atau beberapa studi empiris sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Variabel yang digunakan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pengeluaran daerah (belanja rutin/belanja operasional dan belanja pembangunan/belanja modal), perekonomian daerah (PDRB), pendapatan masyarakat, tingkat deflator harga, dan jumlah penduduk. Hasil dari penelitian ini adalah dana perimbangan memiliki pengaruh relatif yang negatif dan tidak elastis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Propinsi NTB secara relatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah, baik pada belanja operasional maupun belanja modal.

Aspek yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara umum adalah terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risnawaty Sakkirang pada tahun 2001, Aswarodi pada tahun 2004, dan Sahabudin pada tahun 2006 berbeda dengan penelitian ini, yaitu terletak pada permasalahan, analisis data, serta acuan Undang-Undang yang sudah diperbaharui dari Undang-Undang No. 25 tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elli Mayani pada tahun 2001, Astherina Vendayanti pada tahun 2004 yang kurang lebih serupa dalam hal analisis data.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dengan menggunakan analisis data yaitu dengan analisis kontribusi, analisis indeks berantai, dan trend garis lurus (*least square method*). Objek dalam penelitian ini adalah dana perimbangan.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat: Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Waktu: bulan Mei-Juni 2006.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Sedangkan objek penelitian dari penelitian ini adalah dana perimbangan.

D. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Anggaran dan realisasi dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001-tahun 2004.
3. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2001-tahun 2004.
4. Anggaran dan realisasi APBD Kota Yogyakarta dari tahun 2001-tahun 2004.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan literatur-literatur atau teori-teori guna mendukung landasan teori dalam penulisan ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   a. Dokumentasi

      Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dan dokumen berdasarkan sumber data sekunder pada instansi terkait di BPKD, BPS, dan Bappeda Pemerintah Kota Yogyakarta.

   b. Wawancara

      Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan secara langsung pada subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis

melakukan wawancara langsung dengan pegawai instansi terkait di BPKD Pemerintah Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

1. Metode Kualitatif

Dalam hal ini, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

2. Metode Kuantitatif

Dalam hal ini, metode kuantitatif akan menguji dan menilai setiap data yang dikumpulkan dengan menggunakan rumus dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjawab permasalahan yang ada:

a. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan perhitungan kontribusi. Sebelum melakukan perhitungan, dapat dilakukan pengumpulan data mengenai realisasi dana perimbangan dan realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta tahun 2001-tahun 2004. Perhitungan kontribusi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} . 100\%$$

Keterangan:

X: Realisasi dana perimbangan tahun Z

Y: Realisasi pendapatan daerah tahun Z

Setelah diketahui hasil dari perhitungan tersebut maka dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

b. Untuk menjawab masalah kedua digunakan perhitungan indeks berantai. Sebelum melakukan perhitungan, maka dapat dilakukan pengumpulan data mengenai realisasi dana perimbangan Kota Yogyakarta dari tahun 2001-2004. Perhitungan indeks berantai tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{(t-1)/t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} \cdot 100\%$$

Keterangan:

I: indeks

t-1: tahun sebelumnya

t: tahun sesungguhnya

X_t: dana perimbangan tahun sesungguhnya

X_{t-1}: dana perimbangan tahun sebelumnya

Dalam perhitungan indeks berantai ini, pengambilan tahun dasar didasarkan pada tahun yang mendahuluinya. Karena indeks berantai ini ditentukan berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya, maka dari deretan indeks ini dapat lebih mudah mengetahui perkembangan atau perubahan dana perimbangan dari tahun ke tahun secara berurutan. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

c. Untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu tentang prediksi atau peramalan dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang, digunakan trend garis lurus, yaitu:

$Y' = a + bX$

Keterangan:

Y': variabel yang diramalkan, dalam hal ini adalah dana perimbangan

a: konstanta, yang menunjukkan besarnya nilai Y apabila X = 0

b: gradien/lereng garis, yaitu menunjukkan besarnya perubahan Y akibat perubahan X sebesar satu satuan

X: unit waktu, dalam hal ini untuk menyatakan tahun

Dalam melakukan penyelesaian prediksi atau peramalan tersebut perlu ditentukan dahulu besarnya nilai a dan b untuk trend garis lurus dengan formula sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan

n: jumlah data, yaitu dari tahun 2001-tahun 2004

Untuk mempermudah penggunaan rumus di atas, digunakan tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Perhitungan Trend Dana Perimbangan

Tahun	Y	X	X^2	XY	Y' (trend)
2001		-3	9		
2002		-1	1		
		0	0		
2003		1	1		
2004		3	9		
Jumlah		0	20		

Sumber: Data diolah (2006)

Setelah diperoleh persamaan Y = a + bX maka dapat dilakukan perhitungan prediksi dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Untuk perkiraan tahun 2005 maka X = 5, untuk tahun 2006 maka X = 7 dan seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755. Pada tahun itu juga dibangun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buono I di bekas hutan Bering. Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk pada tanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima penghargaan yaitu piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 September 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bertanggung jawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan

Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman telah mempunyai satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Dewan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.17 tahun 1947 pasal 1 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kota Gede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

B. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19''-110°28'53'' Bujur Timur dan antara 07°49'26''-07°15'24'' Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km^2 atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada

pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta memiliki masa bakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota yang berasal dari 5 fraksi.

D. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW, dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 Km². Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.099.263 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 22.287 hektar.

Tabel IV.1
Jarak antara Balaikota Yogyakarta
dengan Kantor Kecamatan

Kecamatan	Jarak (Km)
1. Matrijeron	5,5
2. Kraton	4,0
3. Mergangsan	2,0
4. Umbulharjo	1,0
5. Kotagede	1,0
6. Gondokusuman	3,0
7. Danurejan	1,0
8. Pakualaman	1,5
9. Gondomanan	3,0
10. Ngampilan	5,0
11. Wirobrajan	5,0
12. Gedongtengen	5,0
13. Jetis	4,0
14. Tegalrejo	6,0

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

E. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2004 tercatat 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 47,87 persen laki-laki dan 52,13 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 Km^2, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.246 jiwa per Km^2.

Tabel IV.2
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
di Kota Yogyakarta
2004

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1. Mantrijeron	15.727	16.932	32.659	12.513
2. Kraton	9.163	10.694	19.857	14.184
3. Mergangsan	14.902	16.586	31.488	13.631
4. Umbulharjo	33.646	35.833	69.479	8.557
5. Kotagede	13.667	14.312	27.979	9.114
6. Gondokusuman	23.138	25.479	48.617	12.185
7. Danurejan	9.418	10.404	19.822	18.020
8. Pakualaman	5.091	5.537	10.628	16.870
9. Gondomanan	6.310	7.625	13.935	12.442
10. Ngampilan	8.137	9.490	17.627	21.496
11. Wirobrajan	13.368	13.325	26.693	15.166
12. Gedongtengen	8.342	9.584	17.926	18.673
13. Jetis	12.582	13.456	26.038	15.316
14. Tegalrejo	17.045	18.211	35.256	12.115
Jumlah/Total	**190.536**	**207.468**	**398.004**	**12.246**

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

F. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintahan pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18.964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan 8.057 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP dan SD.

G. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah, perencanaan APBD sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Pada tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 79.911 juta rupiah, meningkat 16,45% dari PAD tahun sebelumnya

yaitu sebesar 68.622 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya hanya 21,58%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan daerah masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta.

H. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra-sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh Pemerintah.

Tabel IV.3
Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan Sekolah dan Status
di Kota Yogyakarta
2004-2005

Sekolah (1)	Negeri (2)	Swasta (3)	Jumlah (4)
1. TK	2	204	206
2. SD	133	86	219
3. Madrasah Ibtidaiyah	1	1	2
4. Sekolah Luar Biasa (SLB)	3	4	7
5. SMP	16	43	59
6. Madrasah Tsanawiyah	1	6	7
7. SMA	11	38	49
8. Madrasah Aliyah	2	5	7
9. SMK	7	23	30
Jumlah/Total	**176**	**410**	**586**

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Pada tahun ajaran 2004/2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 10 institut/sekolah tinggi dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 4.980 orang

yang terdiri dari 4.636 orang dosen yayasan dan 344 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 76.071 orang.

I. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2004 sebanyak 329.386 orang atau 82,76% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,18% Katolik, 6,31% Kristen, 0,22% Hindu, dan 0,43% Budha.

J. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi. Adapun sektor ekonomi tersebut adalah:

1. Pertanian

   Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama bagi sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan

pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

2. Industri

   Industri di Kota Yogyakarta tidak banyak, karena Yogyakarta bukan kota industri. Kota Yogyakarta memiliki beberapa perusahaan kecil, seperti: kerajinan di Kota Gede, BUMD, perusahaan susu SGM, dan industri kecil lainnya.

3. Pariwisata

   Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di Kota Yogyakarta meliputi: Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, kebun binatang Gembira Loka, Pantai Kukup, Pantai Baron, dan tujuan wisata lainnya.

K. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 5.394 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 1.667 milyar rupiah atas dasar harga konstan 1993. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75%. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,08%.

Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,05% (BPS, 2004:263).

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dari tahun 2001-2004, serta bagaimana perubahan dan prediksi dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar anggaran dan realisasi pendapatan daerah, serta anggaran dan realisasi dana perimbangan yang tercantum dalam ringkasan perhitungan APBD Kota Yogyakarta tahun 2001-2004. Data tersebut selanjutnya dianalisis sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi, perubahan, dan prediksi dana perimbangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Analisis data yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah serta perubahan dan prediksi dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2005-tahun 2009. Ada beberapa output yang dihasilkan dalam analisis ini, di mana output tersebut nantinya akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Berikut ini adalah perhitungan dan output-output yang dihasilkan:

1. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001-Tahun 2004.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dari tahun 2001-tahun 2004 dengan menggunakan analisis kontribusi:

a. Mengumpulkan data mengenai realisasi dana perimbangan dan realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta tahun 2001-tahun 2004.

Tabel V.1
Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Th. 2001-2004

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2001	167.269.506.353,29	227.009.170.069,98
2002	187.968.763.862,24	303.020.070.537,68
2003	253.512.731.343,07	338.630.761.654,14
2004	269.967.630.200,69	369.649.879.034,51

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

b. Menghitung kontribusi dengan cara membandingkan realisasi dana perimbangan tahun ke-n dengan realisasi pendapatan daerah tahun ke-n dikalikan 100%.

Berikut ini adalah output yang dihasilkan dari perhitungan kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta mulai tahun 2001-tahun 2004:

1) Tahun 2001

$$\text{Kontribusi}(\%) = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan Th.2001}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Th.2001}} \times 100\%$$

$$= \frac{167.269.506.353,29}{227.009.170.069,98} \times 100\%$$

$$= 73,68\%$$

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 adalah 73,68%.

2) Tahun 2002

$$\text{Kontribusi}(\%) = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan Th.2002}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Th.2002}} \times 100\%$$

$$= \frac{187.968.763.862,24}{303.020.070.537,68} \times 100\%$$

$$= 62,03\%$$

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2002 adalah 62,03%.

3) Tahun 2003

$$\text{Kontribusi}(\%) = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan Th.2003}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Th.2003}} \times 100\%$$

$$= \frac{253.512.731.343,07}{338.630.761.654,14} \times 100\%$$

$$= 74,86\%$$

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2003 adalah 74,86%.

4) Tahun 2004

$$\text{Kontribusi}(\%) = \frac{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2004}}{\text{Re}alisasi \text{ Pendapatan Daerah Th.2004}} \times 100\%$$

$$= \frac{269.967.630.200,69}{369.649.879.034,51} \times 100\%$$

$$= 73,03\%$$

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2004 adalah 73,03%.

Hasil dari perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2
Kontribusi Dana Perimbangan
terhadap Pendapatan Daerah Th. 2001-2004

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2001	167.269.506.353,29	227.009.170.069,98	73,68
2002	187.968.763.862,24	303.020.070.537,68	62,03
2003	253.512.731.343,07	338.630.761.654,14	74,86
2004	269.967.630.200,69	369.649.879.034,51	73,03
Rata-rata			**70,90**

Sumber: Data diolah (2006) berdasarkan tabel V.1

c. Hasil penelitian

Berdasarkan tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2001-tahun 2004 adalah sebesar 70,90%. Dana perimbangan tahun 2001

memberikan kontribusi sebesar 73,68% terhadap pendapatan daerah. Kontribusi terkecil diberikan oleh dana perimbangan pada tahun 2002 sebesar 62,03%. Tahun 2003 dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar yaitu 74,86%. Sedangkan pada tahun 2004 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 73,03%.

2. Perubahan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung perubahan realisasi dana perimbangan dengan menggunakan analisis indeks berantai, yaitu sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data mengenai realisasi dana perimbangan Kota Yogyakarta tahun 2001-tahun 2004, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3
Realisasi Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Th. 2001-2004

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan (Rp)
2001	167.269.506.353,29
2002	187.968.763.862,24
2003	253.512.731.343,07
2004	269.967.630.200,69

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

b. Menghitung indeks berantai dengan cara merasiokan antara realisasi dana perimbangan tahun yang bersangkutan dengan realisasi dana perimbangan tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data pada tabel V.3 perhitungan angka indeks untuk perubahan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2002

$$I_{2001/2002} = \frac{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2002}}{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2001}} \times 100\%$$

$$= \frac{187.968.763.862,24}{167.269.506.353,29} \times 100\%$$

$$= 112,37\%$$

2) Tahun 2003

$$I_{2002/2003} = \frac{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2003}}{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2002}} \times 100\%$$

$$= \frac{253.512.731.343,07}{187.968.763.862,24} \times 100\%$$

$$= 134,86\%$$

3) Tahun 2004

$$I_{2003/2004} = \frac{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2004}}{\text{Re}alisasi \text{ Dana Perimbangan Th.2003}} \times 100\%$$

$$= \frac{269.967.630.200,69}{253.512.731.343,07} \times 100\%$$

$$= 106,49\%$$

Berikut ini adalah hasil dari perhitungan perubahan dana perimbangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.4
Perubahan Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Th. 2001-2004

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan (Rp)	Indeks Rantai Dana Perimbangan (%)
2001	167.269.506.353,29	-
2002	187.968.763.862,24	112,37
2003	253.512.731.343,07	134,86
2004	269.967.630.200,69	106,49

Sumber: Data diolah (2006) berdasarkan tabel V.3

c. Hasil penelitian

Berdasarkan tabel V.4 maka dapat disimpulkan bahwa perubahan dana perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini persentase kenaikan berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2002 perubahan dana perimbangan meningkat sebesar 12,37% dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2001. Perubahan dana perimbangan tahun 2003 paling tinggi yaitu naik mencapai 34,86% dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2002. Sedangkan untuk tahun 2004 dana perimbangan hanya naik sebesar 6,49% dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2003.

3. Prediksi atau Peramalan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) Tahun Mendatang.

Untuk menghitung prediksi atau peramalan dana perimbangan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang digunakan analisis trend

dengan *Least Square Method* (jumlah kuadrat terkecil), dengan persamaan garis trend Y'= a + bX.

a. Mengumpulkan data mengenai realisasi dana perimbangan Kota Yogyakarta tahun 2001-tahun 2004 yang dapat dilihat pada tabel V.3.

b. Melakukan perhitungan trend garis lurus dengan persamaan garis trend Y'= a + bX. Sebelum mendapatkan persamaan garis trend tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1) Menentukan nilai a dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

Keterangan:

a: konstanta, yaitu menunjukkan besarnya Y apabila X = 0

ΣY: jumlah realisasi dana perimbangan

n: jumlah data, yaitu 4 tahun mulai dari tahun 2001-2004.

2) Menentukan nilai b dengan rumus:

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Keterangan:

b: menunjukkan besarnya perubahan Y akibat perubahan X sebesar 1 satuan

X: unit waktu; jarak antara tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah. Dalam hal ini, tahun tengah yang digunakan adalah antara akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003 karena

data yang didapat berjumlah genap yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

3) Menentukan persamaan garis trend dengan rumus:

$Y' = a + bX$

Dalam hal ini, Y' adalah nilai trend dana perimbangan.

Berikut ini ditampilkan tabel V.5 hasil perhitungan trend dana perimbangan untuk tahun 2001-2004:

Tabel V.5
Trend Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Th. 2001-2004

Tahun	Y (Rp)	X	X^2	XY (Rp)	Y' (Rp)
2001	167.269.506.353,29	-3	9	-501.808.519.059,87	163.633.907.086,36
2002	187.968.763.862,24	-1	1	-187.968.763.862,24	200.997.740.988,66
		0	0		
2003	253.512.731.343,07	1	1	253.512.731.343,07	238.361.574.890,96
2004	269.967.630.200,69	3	9	809.902.890.602,07	275.725.408.793,26
Jumlah	**878.718.631.759,29**	**0**	**20**	**373.638.339.023,03**	

Sumber: Data diolah (2006)

Untuk menentukan nilai a dan b, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$
$$= \frac{878.718.631.759,29}{4}$$
$$= 219.679.657.939,81$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$
$$= \frac{373.638.339.023,03}{20}$$
$$= 18.681.916.951,15$$

Setelah diketahui nilai a dan b, maka dapat diterapkan dalam rumus trend, yaitu:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15\ X$$

Dari persamaan garis trend tersebut, kemudian dapat dilakukan prediksi atau peramalan dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2005-tahun 2009 dengan mengalikan nilai X, yang dapat ditampilkan pada tabel V.6 berikut ini:

Tabel V.6
Jarak Tahun yang akan Diprediksi
dengan Tahun Tengah

Tahun yang diprediksi	X
2005	5
2006	7
2007	9
2008	11
2009	13

Sumber: Data diolah (2006)

Selanjutnya dapat dihitung prediksi atau peramalan dana perimbangan untuk tahun 2005-tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

a) Tahun 2005

$Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15\ (5)$

$= 219.679.657.939,81 + 93.409.584.755,75$

$= 313.089.242.695,56$

Dana perimbangan pada tahun 2005 diprediksikan sebesar Rp 313.089.242.695,56.

b) Tahun 2006

Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15 (7)

= 219.679.657.939,81 + 130.773.418.658,05

= 350.453.076.597,86

Dana perimbangan pada tahun 2006 diprediksikan sebesar Rp 350.453.076.597,86.

c) Tahun 2007

Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15 (9)

= 219.679.657.939,81 + 168.137.252.236,35

= 387.816.910.176,16

Dana perimbangan pada tahun 2007 diprediksikan sebesar Rp 387.816.910.176,16.

d) Tahun 2008

Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15 (11)

= 219.679.657.939,81 + 205.501.086.462,65

= 425.180.744.402,46

Dana perimbangan pada tahun 2008 diprediksikan sebesar Rp 425.180.744.402,46

e) Tahun 2009

Y' = 219.679.657.939,81 + 18.681.916.951,15 (13)

= 219.679.657.939,81 + 242.864.919.896,95

= 462.544.577.836,76

Dana perimbangan pada tahun 2009 diprediksikan sebesar Rp 462.544.577.836,76.

Berikut ini ditampilkan tabel hasil dari perhitungan prediksi dana perimbangan untuk tahun 2005-tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.7
Hasil Prediksi atau Peramalan Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Th. 2005-2009

Tahun	Prediksi Dana Perimbangan (Rp)
2005	313.089.242.695,56
2006	350.453.076.597,86
2007	387.816.910.176,16
2008	425.180.744.402,46
2009	462.544.577.836,76

Sumber: Data diolah (2006)

c Hasil penelitian

Berdasarkan tabel V.7 dapat disimpulkan bahwa prediksi atau peramalan dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti dana perimbangan cukup berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah Kota Yogyakarta.

B. Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan terkait dengan output yang dihasilkan dari analisis data di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2001-Tahun 2004.

Dari tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tahun 2001-2004 berkisar antara 62,03%-74,86%. Pada tahun 2001 dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 73,68% terhadap pendapatan daerah.

Pada tahun 2002 meskipun realisasi dana perimbangan dan pendapatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun kontribusi yang diberikan mengalami penurunan sebesar 11,65%, yaitu dari 73,68% menjadi 62,03%. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima dari pos dana perimbangan khususnya pada *item* Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah nihil. Dengan kata lain, pada tahun 2002 Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya pada pos dana perimbangan. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2 Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah pada pos dana perimbangan untuk tahun 2001 dan tahun 2002. Pada tahun 2001 pendapatan hanya diterima dari 4 pos *item* dana perimbangan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pada tahun 2002 pendapatan hanya diterima dari 3 pos *item* dana perimbangan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kontribusi terbesar yang diberikan oleh dana perimbangan terhadap pendapatan daerah terlihat pada tahun 2003, yaitu sebesar 74,86%. Peningkatan kontribusi sebesar 12,83% ini didukung oleh peningkatan realisasi dana perimbangan dan juga realisasi pendapatan daerah secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh adanya penambahan realisasi dari item Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Pada tahun 2004 kontribusi sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 1,83%, yaitu dari 74,86% menjadi 73,03%. Hal ini disebabkan karena peningkatan realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 ke tahun 2004 tidak terlalu besar dibandingkan dengan peningkatan realisasi dana perimbangan dari tahun 2002 ke tahun 2003 sebesar Rp 65.543.967.480,83, yaitu dari Rp 187.968.763.862,24 menjadi Rp 253.512.731.343,07. Sedangkan peningkatan realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 ke tahun 2004 hanya sebesar Rp 16.454.898.857,62, yaitu dari Rp 253.512.731.343,07 menjadi Rp 269.967.630.200,69.

Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama tahun 2001-2004 adalah sebesar 70,90%. Kontribusi dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2003 dengan kontribusi sebesar 74,86%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2002 sebesar 62,03%.

2. Perubahan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004.

Berdasarkan tabel V.4 dapat diketahui bahwa perubahan dana perimbangan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Karena perhitungan angka indeks di mulai pada tahun 2001 maka angka indeks untuk tahun 2001 adalah sebesar 100% (tetap). Pada tahun 2002 perubahan dana perimbangan meningkat sebesar 12,37%. Dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar sebelumya yaitu tahun 2001.

Pada tahun 2003 dana perimbangan terus mengalami peningkatan sebesar 34,86%. Dalam hal ini tahun 2002 adalah sebagai tahun dasar yang digunakan untuk menghitung perubahan dana perimbangan untuk tahun 2003. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2003 Kota Yogyakarta menerima pendapatan dari *item* Bagi Hasil Bukan Pajak khususnya pada Pemberian Hak atas Tanah Negara; padahal tidak dianggarkan pada tahun ini (dapat dilihat pada Lampiran 7). Pada tahun 2004 dana perimbangan hanya meningkat sebesar 6,49%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2004 Kota Yogyakarta tidak menerima realisasi dari *item* Bagi Hasil Bukan Pajak khususnya pada SDA perikanan; padahal Kota Yogyakarta sudah membuat anggaran sebesar Rp 143.190.000,00 untuk pendapatan dari *item* SDA perikanan (dapat dilihat pada Lampiran 8).

3. Prediksi atau Peramalan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) Tahun Mendatang.

Dari persamaan garis yang didapat, yaitu: Y'= 219.679.657.939,81 18.681.916.951,15 X artinya, angka sebesar Rp 219.679.657.939,81 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan besarnya nilai dana perimbangan apabila X=0. Dalam hal ini X adalah akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003. Sedangkan angka 18.681.916.951,15 X menunjukkan besarnya perubahan dana perimbangan setiap 6 bulan.

Berdasarkan tabel V.7 diketahui bahwa hasil prediksi dana perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dari tahun 2005-tahun 2009 akan terus meningkat. Ini berarti, dana perimbangan cukup berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta selama 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar 70,90%.
2. Perubahan dana perimbangan Kota Yogyakarta selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami kenaikan. Dalam hal ini persentase kenaikan berfluktuasi dari tahun ke tahun.
3. Prediksi atau peramalan dana perimbangan Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Setiap 6 bulan, dana perimbangan mengalami peningkatan sebanyak Rp 18.681.916.951,15.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang penulis temukan dalam penyusunan skripsi ini adalah obyek yang diteliti hanya pada pos dana perimbangan secara keseluruhan, tidak per *item* (bagian) dari dana perimbangan. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan *item* (bagian) dari dana perimbangan pada pertengahan periode penelitian yang di mulai pada tahun 2003, yaitu terdapat

item Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Hal ini akan mempengaruhi analisis perubahan dan prediksi dana perimbangan di mana data yang diteliti tidak konsisten bila diteliti per *item* dana perimbangan dari tahun 2001-2004.

C. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari analisis dana perimbangan terhadap pendapatan daerah di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan daerah tersebut dan menciptakan kebijakan atau program-program untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Pada penelitian yang akan datang sebaiknya obyek yang diteliti tidak hanya dibahas pada pos dana perimbangan saja, tetapi juga membahas per *item* dari dana perimbangan yaitu di mulai pada tahun 2003; atau dengan catatan *item* (bagian) dari dana perimbangan dari tahun yang satu dengan yang lain sama. Hal ini dilakukan agar dapat terlihat secara *detail* dari *item* dana perimbangan yang mana yang mempunyai peran lebih besar dari pos dana perimbangan. Dengan demikian dapat dijadikan tolok ukur Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti bagaimana cara mengoptimalkan pendapatan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2004. *Kota Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta

Boedijoewono, Nugroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Bratakusumah, Deddy Supriady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Devas, Nick & Masri Maris. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: UI Press

Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN

Mahi, Raksaka. 2001.Kesiapan Pusat dan Daerah Memasuki Otonomi Daerah. *Kinerja*. Volume 5 No.1. Edisi Juni. Jakarta

Mahi, Raksaka. 2005. Otonomi Daerah dan Iklim Usaha. *Usahawan*. No.07 Tahun XXXIV. Jakarta

Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses&Realita*. Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Marsono. 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Undang-Undang 32 dan 33 tahun 2004. *Manajemen Pembangunan*. No.49 Tahun XIV. Jakarta

Mawardi, M. Sulton. 2001. Indonesia's New Intergovernmental Fiscal System. *www.djpkpd.go.id*

Mayani, Eili. 2001. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Mulanisari, Monica. 2004. Analisis Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi DIY. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: BP. Panca Usaha Putera

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BP. Panca Usaha Putera

Retnowati, Ch Erlita. 2005. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Sahabudin. 2006. Pengaruh Relatif Dana Perimbangan terhadap Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Tesis S-2*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Sakkirang, Risnawaty. 2001. Dana Perimbangan dalam Mengantisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Tesis S-2*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Sudjana. 1991. *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga I*. Edisi Kelima. Bandung: Tarsito

Susanto, Anang Arief. 2001. Menelaah Kontroversi Dana Alokasi Umum. www.otoda.or.id

Tagung, Ferdinandus. 2001. Peramalan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Propinsi DIY). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Tambunan, Mangara. 2005. Desentralisasi dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. *Media Otonomi*. No.10 Tahun I. Halaman 60-61. Jakarta

Tumilar, Richard L.H. 1997. Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulut. *Tesis S-2*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Vendayanti, Astherina. 2004. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung TA. 1999/2000 s/d TA. 2003). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

_____. 2000. *Peraturan Pemerintah No.104 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta

_____. 2004. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

LAMPIRAN

Lampiran 1

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah
Kota YogyakartaTahun 2001

No.	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1	**Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu**	**Rp 19.183.584.331,26**	**Rp 19.183.584.331,26**
2	**Bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri**	**33.125.458.598,74**	**40.352.592.890,43**
	a. Pajak Daerah	17.814.447.519,50	22.886.374.632,50
	b. Retribusi Daerah	11.503.842.081,00	1.773.895.343,16
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	2.249.570.045,51	2.249.570.025,31
	d. Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang sah	1.557.598.952,73	3.442.752.889,46
3	**Dana Perimbangan**	**153.014.249.000,00**	**167.269.506.353,29**
	a. Bagi Hasil Pajak	17.872.784.000,00	32.634.378.613,29
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.220.000.000,00	483.655.466,00
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	113.438.727.000,00	113.437.221.225,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	20.482.738.000,00	20.714.251.109,00
	e. Dana Darurat	0,00	0,00
4	**Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah**	**0,00**	**0,00**
	a. Pos Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
	b. Pos Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
5	**Bagian Lain-lain Penerimaan yang sah**	**143.723.070,00**	**203.486.495,00**
Jumlah		**Rp 205.467.015.000,00**	**Rp 227.009.170.069,98**

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2001)

Lampiran 2

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2002

No.	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1	**Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu**	**Rp 34.595.208.955,59**	**Rp 35.596.366.520,59**
2	**Pendapatan Asli Daerah**	**49.685.313.410,17**	**56.377.459.398,89**
	a. Pajak Daerah	27.107.396.233,00	30.517.591.845,50
	b. Retribusi Daerah	13.991.791.110,00	14.193.457.159,11
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.509.234.852,65	2.509.234.852,65
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.076.891.214,52	9.157.175.541,63
3	**Dana Perimbangan**	**185.333.797.889,24**	**187.968.763.862,24**
	a. Bagi Hasil Pajak	21.985.125.317,00	24.744.094.790,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	808.672.572,24	350.156.572,24
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	162.540.000.000,00	162.874.512.500,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00
	e. Dana Darurat	0,00	0,00
4	**Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**
	a. Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
	b. Pos Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
5	**Lain-lain Penerimaan yang sah**	**17.459.217.745,00**	**23.077.480.755,96**
Jumlah		**Rp 287.073.538.000,00**	**Rp 303.020.070.537,68**

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2002)

Lampiran 3

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2003

No.	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	**Realisasi**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp 56.822.010.000,00**	**Rp 68.621.564.311,07**
	a. Pajak Daerah	32.068.358.000,00	33.526.514.267,53
	b. Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	16.093.220.398,50
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	2.509.235.000,00	4.081.649.388,86
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6.525.832.000,00	14.920.180.256,18
2	**Dana Perimbangan**	**238.756.313.000,00**	**253.512.731.343,07**
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.458.673.000,00	32.300.731.328,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	196.100.000.000,00	196.100.000.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.997.640.000,00	20.912.000.015,07
3	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**7.841.710.000,00**	**16.496.466.000,00**
	a. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	7.841.710.000,00	16.496.466.000,00
Jumlah		**Rp 303.420.033.000,00**	**Rp 338.630.761.654,14**

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2003)

Lampiran 4

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2004

No.	Uraian	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp 70.412.081.000,00**	**Rp 79.911.416.100,82**
	a. Pajak Daerah	38.149.900.000,00	40.581.980.256,00
	b. Retribusi Daerah	18.269.452.000,00	18.995.046.383,00
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.188.903.000,00	5.285.786.650,47
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.803.826.000,00	15.048.605.811,35
2	**Dana Perimbangan**	**252.390.201.000,00**	**269.967.630.200,69**
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	29.583.201.000,00	37.889.440.614,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	197.787.000.000,00	197.787.000.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	19.520.000.000,00	28.791.189.586,69
3	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**18.342.100.000,00**	**19.770.829.733,00**
	a. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	5.043.100.000,00	6.471.829.733,00
	b. Dana Penyesuaian Ad Hoc	13.299.000.000,00	13.299.000.000,00
Jumlah		**Rp 341.144.382.000,00**	**Rp 369.649.879.034,51**

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2004)

Lampiran 5

Ringkasan Pos-Pos Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2001

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.3	Dana Perimbangan	Rp 153.014.249.000,00	Rp 167.269.506.353,29
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	17.872.784.000,00	32.634.378.613,29
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.220.000.000,00	483.655.466,00
1.3.3	Dana Alokasi Umum	113.438.727.000,00	113.437.221.225,00
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	20.482.738.000,00	20.714.251.109,00
1.3.5	Dana Darurat	0,00	0,00

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2001)

Lampiran 6

Ringkasan Pos-Pos Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2002

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1.3	**Dana Perimbangan**	**Rp 185.333.797.889,24**	**Rp 187.968.763.862,24**	**Rp 2.634.965.973,00**
1.3.1	**Bagi Hasil Pajak**	**21.985.125.317,00**	**24.744.094.790,00**	**2.758.969.473,00**
1.3.1.001	Pajak Bumi dan Bangunan	10.226.621.143,00	10.919.471.367,00	692.850.224,00
002	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.258.504.174,00	5.492.182.876,00	233.678.702,00
003	Pajak Penghasilan Pasal 21	6.500.000.000,00	8.332.440.547,00	1.832.440.547,00
1.3.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak**	**808.672.572,24**	**350.156.572,24**	**(458.516.000,00)**
1.3.2.001	Provisi Sumber Daya Hutan	158.672.572,24	158.672.572,24	**0,00**
002	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	650.000.000,00	191.484.000,00	(458.516.000,00)
1.3.3	**Dana Alokasi Umum**	**162.540.000.000,00**	**162.874.512.500,00**	**334.512.500,00**
1.3.4	**Dana Alokasi Khusus**	0,00	0,00	0,00
1.3.5	**Dana Darurat**	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2002)

Lampiran 7

Ringkasan Pos-Pos Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2003

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1.2	**Dana Perimbangan**	**Rp 238.756.313.000,00**	**Rp 253.512.731.343,07**	**Rp 14.756.418.343,07**
1.2.1	**Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**	**25.458.673.000,00**	**32.300.731.328,00**	**6.842.058.328,00**
1.2.1.01	**Bagi Hasil Pajak**	**25.300.000.000,00**	**31.855.929.646,00**	**6.555.929.646,00**
01.01	Pajak Bumi dan Bangunan	12.541.496.000,00	13.488.889.379,00	947.393.379,00
01.02	BPHTB	5.258.504.000,00	7.031.468.452,00	1.772.964.452,00
01.03	Pajak Penghasilan Pasal 21	7.500.000.000,00	11.335.571.815,00	3.835.571.815,00
1.2.1.02	**Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Hutan**	**158.673.000,00**	**444.801.682,00**	**286.128.682,00**
02.01	Provisi Sumber Daya Hutan	158.673.000,00	439.564.682,00	280.891.682,00
02.02	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
1.2.2	**Dana Alokasi Umum**	**196.100.000.000,00**	**196.100.000.000,00**	**0,00**
1.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**0,00**

1.2.4	**Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi**	**Rp 12.997.640.000,00**	**Rp 20.912.000.015,07**	**Rp 7.914.360.015,00**
1.2.4.01	**Bagi Hasil Pajak Propinsi**	**12.934.673.000,00**	**20.778.481.915,07**	**7.843.808.915,00**
01.01	Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00	14.881.219.975,05	4.881.219.975,00
01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.700.000.000,00	5.449.554.740,02	2.749.554.740,00
01.06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah	100.000.000,00	315.210.000,00	215.210.000,00
01.08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	134.673.000,00	132.497.200,00	(2.175.800,00)
1.2.4.03	**Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi**	**62.967.000,00**	**133.518.100,00**	**70.551.100,00**
03.01	Penyisihan Retribusi Propinsi	62.967.000,00	133.518.100,00	70.551.100,00

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2003)

Lampiran 8

Ringkasan Pos-Pos Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2004

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1.2	**Dana Perimbangan**	**Rp 252.390.201.000,00**	**Rp 269.967.630.200,69**	**Rp 17.577.429.200,69**
1.2.1	**Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**	**29.583.201.000,00**	**37.889.44.614,00**	**8.306.239.614,00**
1.2.1.01	**Bagi Hasil Pajak**	**29.341.496.000,00**	**37.517.931.075,00**	**8.176.435.075,00**
01.01	Pajak Bumi dan Bangunan	12.541.496.000,00	16.980.061.288,00	4.438.565.288,00
01.02	BPHTB	5.800.000.000,00	12.523.201.694,00	6.723.201.694,00
01.03	Pajak Penghasilan Pasal 21	11.000.000.000,00	8.014.668.093,00	(2.985.331.907,00)
1.2.1.02	**Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam**	**241.705.000,00**	**371.509.539,00**	**129.804.539,00**
02.01	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	371.509.539,00	272.994.539,00
02.10	Sumber Daya Alam Perikanan	143.190.000,00	0,00	(143.190.000,00)
1.2.2	**Dana Alokasi Umum**	**197.787.000.000,00**	**197.787.000.000,00**	**0,00**
1.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	**5.500.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**0,00**

1.2.4	**Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi**	**Rp 19.520.000.000,00**	**Rp 28.791.189.586,69**	**Rp 9.271.189.586,69**
1.2.4.01	**Bagi Hasil Pajak Propinsi**	**19.400.000.000,00**	**28.472.446.803,69**	**9.072.446.803,69**
01.01	Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.000.000.000,00	19.890.648.449,82	5.890.648.449,82
01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	7.796.812.182,23	2.796.812.182,23
01.06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah	300.000.000,00	568.000.471,64	268.000.471,64
01.08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000,00	216.985.700,00	116.985.700,00
1.2.4.03	**Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi**	**120.000.000,00**	**318.742.783,00**	**198.742.783,00**
03.01	Penyisihan Retribusi Propinsi	120.000.000,00	318.742.783,00	198.742.783,00

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (2004)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Valentina Arie Purwaningsari
Nama Panggilan	Arie
Tempat, Tanggal Lahir	Cilegon, 10 Maret 1984
E-mail	valentina_arie@yahoo.com
No. HP	+62 818 0803 6131
Alamat Asal	Pondok Cilegon Indah Blok D.89 No.22 Cilegon-Banten
Alamat Selama Kuliah	Asrama Syantikara Jl. Colombo CT VI No.001 Yogyakarta 55281
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Katolik
Status	Belum Menikah
Pendidikan	**2002- 2006** : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Program Studi Akuntansi **1999-2002** : SMU Tarakanita 1 Jakarta Selatan **1996-1999** : SLTP Mardi Yuana Cilegon-Banten **1990 -1996** : SD Mardi Yuana Cilegon-Banten
Pengalaman Berorganisasi	**Ketua Asrama Syantikara** periode 2005-2006 **Ketua Pekan Orientasi Asrama** (POSMA) Syantikara periode 2006 **Bendahara Asrama Syantikara** periode 2004-2005 **Koordinator Seksi Publikasi, dekorasi, dan dokumentasi** Dies Asrama Syantikara 2005 **Koordinator Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)** Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Universitas Sanata Dharma periode 2004-2005 **Dirigen Paduan Suara Fakultas Ekonomi** Universitas Sanata Dharma periode 2003-2005
Kegiatan yang pernah diikuti	**Peserta Seminar *"Heroic Leadership"*** Universitas Sanata Dharma, 21 Mei 2005 **Peserta Bakti Sosial Masyarakat** (BSM), Dusun Jetis, Pundong, Bantul, Yogyakarta 16,17,18,25,26 Juni 2005 **Peserta *2nd National Accounting Smart Challenges "Accounting Program to Prepare The Profesional Account"*,** Universitas Kristen Duta Wacana, 01-02 Oktober 2004 **Peserta Pelatihan Pengembangan Kepribadian** Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 30-31 Januari 2003
Kemampuan Komputer	Ms. Office, Value Plus, Fox Pro, ACL
Beasiswa	***Scholarship Fund*** Universitas Sanata Dharma, Juli-Desember 2005

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2449

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk **No** : 31/Kaprodi Akt/099/IV/2006
Tanggal : 26 April 2006 **Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada :

Nama : **VALENTINA ARIE PURWANINGSARI** **No. Mhs./NIM :** 022114081
Alamat Instansi : **Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta**
Judul : KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SERTA PERUBAHAN DAN PREDIKSI DANA PERIMBANGAN UNTUK TAHUN MENDATANG

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 04 Mei 2006 s/d 04 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Ka. BAPEDA Prop. DIY;
5. Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk;
6. Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Mei 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAPEDA

IR. NANANG SUWANDI
NIP. [illegible]

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/841
1865/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2449 Tanggal : 04/05/2006

Mengingat :
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan Kepada
Nama : VALENTINA ARIE P. NO MHS / NIM : 022114081
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD
Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : Firma sulistiyowati, SE., M.Si
Keperluan : **Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SERTA PERUBAHAN DAN PREDIKSI DANA PERIMBANGAN UNTUK TAHUN MENDATANG (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 04/05/2006 Sampai 04/08/2006
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakrta
Pada Tanggal : 08/05/2006

Tanda tangan
Pemegang Izin

VALENTINA ARIE P.

A.n. Kepala
Ka. Bidang Pelayanan

DINAS PERIZINAN

Drs. SUTARTO
NIP. 090020004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
4. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
5. Ka. Bag. Perekonomian dan PAD Setda Kota Yk.
6. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA